



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 9428-9438

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Strategi Peningkatan Kesadaran Tata Kelola Pembangunan Kependudukan Kolaboratif (Program Kampung KB (Keluarga Berkualitas) Di Kabupaten Siak Tahun 2023

Sadriah Lahamid^{1✉}, Septa Juliana², Daharmi Astuti³, Fardina ningsih⁴

Universitas Islam Riau

Email : 711sadriah@soc.uir.ac.id^{1✉}

Abstract

The demographic bonus that will hit Indonesia in 2030-2040, where the productive age population (15-64 years) is greater than the non-productive age (65 years and over) more than 60% of the total population of Indonesia. Productive age is expected to contribute positively to development rather than being a population disaster for development, including in Siak District. A comprehensive strategy is needed so that when the demographic bonus occurs, the government is ready with regulations and human resources for managers and objects of population development programs. The Siak Regent's strategy to increase awareness by issuing the Siak Regent Decree number: 213/HK/KPTS/2023 concerning the Establishment of Quality Family Villages at the Village and Kelurahan levels in Siak District in 2023 has not been implemented properly, based on this policy, 131 KB villages should have been formed in Siak District in 2023. This happens because stakeholders do not understand the benefits of population development governance. Synergy is needed in the implementation of the KB Village program with a collaborative Governance pattern, so that it becomes a solution to population development in Siak district. Research using qualitative methods, directly interacting with the object of research.

Keywords: *Collaborative Governance, Awareness Raising Strategy, Demographic Bonus, Quality Family Village*

Abstrak

Bonus demografi yang akan melanda Indonesia tahun 2030-2040, dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia. Usia produktif diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan bukan menjadi bencana kependudukan terhadap pembangunan tidak terkecuali di Kabupaten Siak. Diperlukan strategi yang komprehensif agar pada saat bonus demografi terjadi maka pemerintah siap dengan regulasi dan sumber daya manusia pengelola maupun yang menjadi objek program pembangunan kependudukan. Strategi Bupati Siak agar meningkatkan kesadaran tersebut dengan menerbitkan SK Bupati Kabupaten Siak nomor: 213/HK/KPTS/2023 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Siak tahun 2023 belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan kebijakan tersebut seharusnya telah terbentuk 131 Kampung KB di Kabupaten Siak tahun 2023. Hal ini terjadi karena stakeholders tidak memahami tentang manfaat tata Kelola pembangunan kependudukan. Diperlukan sinergitas dalam pelaksanaan program Kampung KB dengan pola Tata Kelola kolaboratif, sehingga menjadi solusi pembangunan kependudukan di kabupaten Siak. Penelitian menggunakan metode kualitatif, langsung berinteraksi dengan objek penelitian.

Kata Kunci : *Tata Kelola Kolaboratif, Strategi Peningkatan Kesadaran, Bonus Demografi, Kampung Keluarga Berkualitas*

PENDAHULUAN

Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023 adalah melakukan tugas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Artinya pembangunan kependudukan menjadi domainnya, termasuk pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di kabupaten Siak.

Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 yang dimutakhirkan dengan *Long Form* Sensus Penduduk Tahun 2020, tercatat jumlah penduduk Kabupaten Siak sebanyak 457.940 jiwa. Jumlah penduduk tersebut jika dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 mengalami kenaikan sebanyak 78.851 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata pertahunnya sekitar 1,97 persen. Namun pada Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi

477.550 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk selama 2 tahun tersebut sebesar 2,12 persen.

Pertambahan penduduk di Kabupaten Siak relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Provinsi Riau pada periode yang sama (Tahun 2020 – Tahun 2022), yakni sebesar 2,82 persen. Jumlah penduduk Kabupaten Siak per Kecamatan selama tahun 2020- 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1: Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Siak Menurut Kecamatan Tahun 2020-2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan 2020- 2022
	2020	2021	2022	
Minas	28.948	29.249	29.673	1,24
Sungai Mandau	9.128	9.333	9.582	2,43
Kandis	74.727	76.590	78.818	2,66
Siak	31.144	32.215	33.459	3,58
Kerinci Kanan	23.783	23.870	24.055	0,57
Tualang	120.655	122.349	124.568	1,60
Dayun	30.959	31.414	32.005	1,66
Lubuk Dalam	19.905	20.210	20.603	1,72
Koto Gasib	23.469	24.007	24.657	2,47
Mempura	16.951	17.248	17.622	1,94
Sungai Apit	30.997	31.638	32.423	2,25
Bunga Raya	26.777	27.414	28.180	2,55
Sabak Auh	12.911	13.256	13.666	2,84
Pusako	7.586	7.890	8.239	4,13
SIAK	457.940	466.683	477.550	2,10

Sumber : BPS, Siak Dalam Angka 2023

Table 1.1. diatas menggambarkan bahwa Kabupaten Siak dengan 14 kecamatan, penyebarannya yang tidak merata, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tualang yaitu sebanyak 124.568 jiwa sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah di Kecamatan Pusako yaitu sebanyak 8.239 jiwa.

Pada laju pertumbuhan penduduk yang juga relatif tidak sama, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di kecamatan Pusako sebesar 4,13 persen, hal ini disebabkan oleh karena di kecamatan tersebut selama kurun waktu tahun 2020 – 2022 sedang terjadi proses ekspansi sektor pertanian khususnya perkebunan dan kehutanan (Hutan Tanaman Industri).

Sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terjadi di kecamatan Kerinci Kanan sebesar 0,57 persen. Sementara kecamatan di Ibu Kota Kabupaten, yakni Kecamatan Siak laju pertumbuhan penduduk tertinggi kedua setelah Kecamatan Pusako yakni sebesar 3,58 persen.

Fenomena yang terjadi dikabupaten Siak bahwa Rasio Beban Ketergantungan *Dependency Ratio (DR)* penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif (Adriani & Yustini, 2021) secara keseluruhan (usia 0 – 14 tahun dan 65 tahun keatas) terjadi di Kabupaten Siak pada tahun 2023 adalah sebesar 45,00 yang artinya adalah rasio dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 penduduk usia tidak produktif. Tingginya

tingkat ketergantungan Kabupaten Siak masih tinggi. Dilain pihak banyaknya perusahaan swasta yang beroperasi disuatu wilayah seharusnya berdampak positif pada Masyarakat setempat(Anggaran et al., n.d.) .

Penyelenggaraan Pembangunan yang bersifat komprehensif, berkualitas, berkelanjutan tidak terlepas dari peran penduduk dengan segala dinamikanya baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif (Partisipasi Pembangunan Dalam Ajaran Islam, n.d.; Zamaya & Tampubolon, 2021).

Dimensi kependudukan memiliki spektrum luas yang mencakup aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk, aspek keluarga, dan aspek data, informasi dan administrasi kependudukan (Meilani et al., 2022). Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kolaboratif stakeholders (Sufianti et al., 2013), kolaboratif dapat dilakukan agar tercapainya tujuan pembentukan Kampung KB meningkatnya kualitas keluarga di Kabupaten Siak.

Tata kelola kolaboratif menyatukan para pelaku publik dan pemangku kepentingan swasta dalam upaya bersama untuk memecahkan masalah sosial yang kompleks di dunia yang bergejolak, serta menciptakan solusi dan hasil tata kelola yang bernilai bagi masyarakat dan nilai-nilai publik (Ansell dan Gash 2008; Emerson dkk. 2012)(Sørensen & Torfing, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Metode ini dipilih karena kelebihanannya dalam menangkap nuansa dan kompleksitas dari pengalaman subjek, yang mungkin tidak dapat terungkap melalui metode kuantitatif.

Interaksi langsung dengan objek penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, motivasi, dan perasaan subjek secara mendetail. Sementara itu, observasi partisipatif memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melihat dan memahami konteks sosial dan budaya dari subjek penelitian secara langsung.

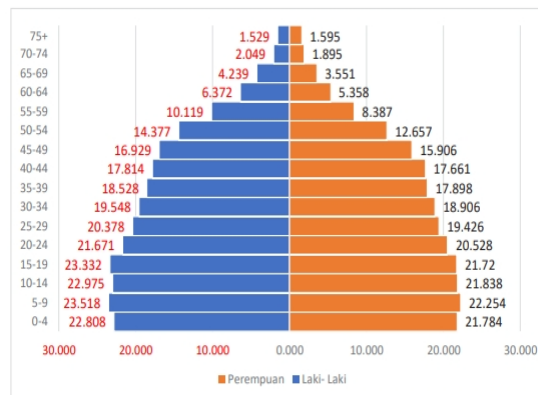
Dengan menggunakan metode kualitatif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan mendalam, yang akan sangat berguna dalam memahami

fenomena yang diteliti serta dalam menyusun rekomendasi atau kesimpulan yang lebih relevan dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Peningkatan Kesadaran Tata Kelola Pembangunan Kependudukan

Urusan kependudukan merupakan urusan pemerintahan konkuren dimana urusan pemerintahan pusat yang dibagi dengan pemerintahan daerah atau provinsi. Ini merupakan amanah dari UU no.14 tahun 2023. Untuk itu daerah provinsi maupun Kabupaten Kota harus menyiapkan Dinas untuk mengurus tentang kependudukan. Data BPS menunjukkan jumlah Penduduk Riau berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Riau sebanyak 6,39 juta jiwa, Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten, 2 kota, 169 kecamatan, 268 kelurahan dan 1.591 desa. Data BPS ada 593 Kampung KB dari 12 kabupaten dan Kota terdapat Kampung KB.



Sumber: BPS, 2023; Long Form SP 2020.

Gambar 1.1 : Piramida Penduduk Kabupaten Siak Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020

Secara piramida, kondisi penduduk Kabupaten Siak secara umum menggambarkan kondisi piramida relatif berimbang namun jumlah penduduk Perempuan lebih besar. Penduduk yang berusia 5 – 9 tahun baik laki-laki maupun Perempuan adalah yang paling menonjol, sedangkan yang paling kecil adalah penduduk lansia yang berusia 75 keatas. Untuk mendalami penelitian ini peneliti mereview jurnal-jurnal yang mengakaji tentang Kampung KB.

Pertama : Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek type manfaat dan perubahan yang diharapkan merupakan aspek pendukung dan dianggap sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Program Kampung KB dapat dinyatakan berhasil, sedangkan aspek sumber daya yang digunakan

masih perlu dibenahi karena dengan alokasi anggaran dan dukungan sarana prasarana dari pemerintah pusat, penyuluh KB diharapkan dapat lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan program ini.

Kedua : Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kampung Berkualitas Pada Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan Kampung KB di Kelurahan Way Lunik telah terinternalisasi dengan baik, partisipasi masyarakat sangat baik dengan sukarela merintis dan terlibat dalam kegiatan Kampung KB sampai saat ini. Namun kendala pelaksanaan kegiatan pada masa pandemi Covid-19 saat ini menyebabkan keterbatasan pada pelaksanaan kegiatan. Kegiatan koordinasi dan sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan sosial media. Berdasarkan tahapan partisipasi public Arnstein maka partisipasi masyarakat Kelurahan Way Lunik dalam mengelola Kampung KB berada pada level 6 yaitu partnership (bekerjasama). (<https://jurnalbestari.ntbprov.go.id/index.php/bestari1/article/download/58/23>).

Ketiga Collaborative Governance Melalui Program Kampung KB Di Kabupaten Jombang tahun 2019. Hasilnya, secara umum keberadaan Kampung KB berkontribusi secara signifikan pada penguatan program KKBPK. Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, CSO, Sektor swasta dan masyarakat menghasilkan kekuatan besar yang membuat program ini dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, walaupun tidak bisa dipungkiri masih terdapat beberapa kendala dalam anggaran dan fungsi koordinatif. Oleh karena itu solusi yang ditawarkan dalam tulisan ini berupa penguatan anggaran serta dibentuknya forum yang bisa menjadi wadah koordinasi bagi semua pihak terkait untuk selalu berkoordinasi dan melakukan evaluasi. (<http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/21814/0>).

Dari beberapa penelitian sebelumnya bahwa begitu besar harapan terhadap kampung KB. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian yang ditetapkan oleh peneliti adalah ingin mengetahui strategi peningkatan kesadaran tata kelola pembangunan kependudukan kolaboratif (studi kasus program kampung keluarga berkualitas (Kampung KB) di kabupaten Siak tahun 2023. Dasar penentuan lokasi penelitian adalah di Kabupaten Siak dari tahun 2017 – 2023 perkembangan jumlah terbentuknya 131 Kampung KB sangat signifikan. Daerah yang telah membentuk Kampung KB di setiap kampung dan kelurahan diseluruh Kabupaten Siak, sedangkan Kabupaten Kota di Provinsi Riau belum ada yang dapat membentuk Kampung KB dim seluruh Desa dan kelurahannya hingga tahun 2023 (Sumber data Web BKKBN).

Namun demikian fenomena yang terjadi : 1). Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SGGI) tahun 2022, angka prevalensi atau jumlah keseluruhan kasus penyakit dalam periode waktu tertentu terhadap stunting di Kabupaten Siak mengalami kenaikan sebesar 3 persen 2). Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Siak terputus sampai kelas 2 SMA sederajat, artinya belum mencapai wajib belajar 12 tahun. 3). Syarat dibentuknya Kampung KB salah satunya adalah tersedianya Data Kependudukan yang akurat, namun hingga saat ini pemerintah masih kesulitan mendapatkan data kependudukan dalam menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Siak.

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Siak nomor: 213/HK/KPTS/2023 tentang Pembentukan Kampung Keluarga berkualitas tingkat Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Siak tahun 2023, Tahun 2016 dan 2018 sudah terbentuk 24 kampung KB.

Berdasarkan Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 27 Tahun 2011 tentang Penyusunan Grand Design serta Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 terkait Pembangunan Kependudukan, maka ada lima bidang yang akan menjadi kajian sebagai berikut: 1). Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk 2). Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk 3). Bidang Pembangunan Keluarga Berkualitas 4). Bidang Panataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk 5). Bidang Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan Kolaboratif Tata Kelola Pembangunan Kependudukan

Mengingat penting dan strategisnya peran penduduk, maka David Korten pada tahun 1984 mencanangkan konsep pembangunan yang berorientasi pada kependudukan atau *People Centered Development* yang mengacu pada 3 nilai utama, yakni keadilan (*justice*), keberlanjutan (*sustainable*), dan inklusif (*inclusiveness*), dimana konsep tersebut dijabarkan oleh pemerintah dalam bentuk Pembangunan Berwawasan Kependudukan dengan isu utamanya adalah terkait dengan menjadikan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, pembangunan yang responsive population, dan pembangunan partisipatif.

Konsep pembangunan yang memiliki relevansi yang kuat dengan eksistensi penduduk memiliki tujuan akhir berupa peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup penduduk, keluarga bahagia yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Capaian terhadap tujuan pembangunan tersebut tidak terlepas dari ketersediaan data dan informasi kependudukan yang

telah dianalisis secara mendalam berdasarkan pendekatan teknokrasi yang kuat oleh para akademisi yang berkolaborasi dengan praktisi.

Program Kampung KB (Keluarga Berkualitas)

Tujuan pembentukan Kampung KB untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung KB dapat dilakukan Langkah-langkah secara terkoordinir dan terintegrasi melalui :

- a. Penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan
- b. Perubahan perilaku keluarga
- c. Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga
- d. Penataan lingkungan keluarga

Pilot projek kampung KB di Siak Pilot projek Kampung KB Kelurahan Tumang kabupaten Siak. Kendala yang dihadapi pengelola adalah tidak dianggarkannya dana operasional kampung KB dalam APBD dan anggaran desa di Kabupaten Siak. Sehingga kampung KB kurang berjalan lancar.

Pembangunan Keluarga Berkualitas Strategi pembangunan Keluarga Berkualitas yang dapat dilaksanakan adalah:

- 1) Membangun keluarga yang memiliki kualitas dalam penerapan nilai-nilai keagamaan yang semakin kuat melalui pendidikan keagamaan, pendidikan etika dan moral, serta penerapan nilai-nilai sosial budaya secara formal, informal maupun non formal secara berkelanjutan pada setiap jenjang pendidikan dan lini masyarakat;
- 2) Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah dilakukan dengan hal berikut; meningkatkan pelayanan lembaga konsultasi dan nasehat perkawinan, meningkatkan peran kelembagaan keluarga, Komitmen pemerintah yang hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama, adat dan negara, perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat;
- 3) Membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan berbudaya Melayu serta budaya sehat melalui peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal, pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial dan sehat lingkungan), pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter 109 baik, pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan ekonomi keluarga melalui pemanfaatan pekarangan, pengelolaan aset rumah tangga, dan dukungan sosial lingkungan;

- 4). Membangun keluarga yang berkebudayaan Melayu, berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, daerah, negara dan bangsa melalui pengembangan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga berketahanan, pemilihan keluarga sebagai pionir dan peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- 5). Membangun keluarga yang mampu merencanakan perolehan dan pengelolaan sumberdaya dengan pendampingan manajemen sumberdaya keluarga; dan
- 6). Mengembangkan pola konsultasi keluarga, pengasuhan anak, manajemen keuangan rumah tangga, manajemen stress dan manajemen waktu serta pekerjaan rumah,

Selain itu strategi yang berkaitan dengan pembangunan keluarga juga dilakukan dengan cara penguatan pemahaman 8 (delapan) fungsi keluarga, optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita, serta pembentukan dan penguatan karakter anak sejak dini melalui keluarga, peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta KB MKJP khususnya MOW dan MOP, serta peserta KB mandiri di wilayah kampung KB, Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan, penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia, serta peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.

SIMPULAN

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintahan kabupaten Siak, terutama DP3AP2KB dalam strategi peningkatan kesadaran tata kelola pembangunan kependudukan kolaboratif (program Kampung KB (Keluarga Berkualitas) di kabupaten Siak tahun 2023. Keasaran tata kelola tidak hanya tergantung pada pengelola tetapi juga perlu dukungan pemerintahan kabupaten terutama pengalokasian dana operasional di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Catatan serta kejelasan posisi dan peran swasta dalam Kampung KB.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, D., & Yustini, T. (2021). Anticipating the demographic bonus from the perspective of human capital in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 10(6), 141–152. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i6.1377>

- Anggaran, K., Keahlian, B., Perwakilan, D., & Ri, R. (n.d.). *Relationship between Demographic Bonus, Human Development Index, and Employment Development Index with Economic Growth Marihot Nasution* (Vol. 6, Issue 1).
- Arfani, M. (2022). Kolaborasi pentahelix dalam upaya pengurangan risiko bencana pada destinasi wisata di Desa Kalanganyar Sidoarjo. *Jurnal Syntax Transformation*. <http://www.jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/497>
- Asnani, & Shodiq, M. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kampung Berkualitas Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Bestari*, 2(2), 1–9.
- Chen, S., Sun, X., & Su, S. (2021). A study of the mechanism of community participation in resilient governance of national parks: With wuyishan national park as a case. *Sustainability (Switzerland)*, 13(18). <https://doi.org/10.3390/su131810090>
- Hasriani, Yunus, R., & Hamsinah. (2021). Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Implementation Of The Kampung KB in Pangkajene Regency And The Islands. *Spirit Publik*, 16, 137–150.
- Meilani, N. L., Yusri, A., & Asriwandari, H. (2022). Geliat Pengembangan Program Kependudukan Dan Keluarga Berencana Di Kecamatan Rukat Utara. *Journal Publicuho*. <http://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/23> *Partisipasi Pembangunan Dalam Ajaran Islam*. (n.d.).
- Ramadhan, H., & Adnan, M. F. (2020). Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Di Kawasan Pesisir Pantai Air Manis Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 110–118. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.39>
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2021). Accountable government through collaborative governance? *Administrative Sciences*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/admsci11040127>
- Sufianti, E., Sawitri, D., Nur Pribadi, K., Firman, T., Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, M., Arsitektur, S., Pengembangan Kebijakan, dan, Teknologi Bandung, I., & Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, D. (2013). Proses Kolaboratif dalam Perencanaan Berbasis Komunikasi pada Masyarakat Nonkolaboratif. In *Terakreditasi' SK Kemendikbud* (Vol. 29, Issue 2). Desember.
- Yunas, N. S., & Nailufar, F. D. (2019). Collaborative Governance Melalui Program Kampung Kb Di Kabupaten Jombang. *CosmoGov*, 5(2), 162. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.21814>

Zamaya, Y., & Tampubolon, D. (2021). Kebijakan penentuan pusat pertumbuhan industri untuk mendukung pembangunan daerah. *Jurnal Niara*. <https://pustaka-psm.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/6248>